

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*.
Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012.
- Bappenas RI Menyatakan dalam Buku Pedoman Peraturan Pengamanan Program
Pembangunan Daerah Bappenas dan Depdagri.
- Blasius, Sudarsono. *Memahami Dokumentasi*. Jurnal Ilmiah Acarya Pustaka.
Vol.3. No.1. Juni 2017
- BPS. *Data Sensus*. Dalam www.trenggalekkab.bps.go.id. (Diakses pada Sabtu, 9
September 2023)
- Dwiningrum, Irene Siti Astuti. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat
dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- E Novita. N dan Tsali T. M. 2021. *Pembelajaran Berbasis Media Digital Pada
Anak Usia Dini Di Era Revolusi Industri 4.0 : Studi Literatur*. Jurnal Ilmiah
Potensia (2021) Vol. 6 No. 1
- Fadhallah. 2021. *Wawancara*. Jember : UNJ PRESS
- Franco Benony Limba, et.al. 2020. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada
Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory Of Planned Behavior”. *Jurnal Akuntansi
dan Keuangan*. Vol. 9 No. 2
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS23*.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Engagement.

Gramedia Literasi. *Hubungan Teori Keagenan*. Dalam www.gramedia.com.

(Diakses pada Jum'at 08 September 2023)

Grigg N, *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley & Sons.

Ihyaul, Ulum. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jitmau F, L Kalangi, L Lambey. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*. 8 (1).

Kementerian ESDM. *Pembangunan Infrastruktur*, dalam www.esdm.go.id

(Diakses pada Sabtu, 9 September 2023)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kapabilitas*. Dalam www.djn.kemenkeu.go.id (Diakses pada Jum'at 08 September 2023)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. *Informasi Publik untuk Wujudkan Good Governance*. Dalam www.ppid.menpan.go.id. (Diakses pada Jum'at, 8 September 2023)

Kementerian Perindustrian. *Transparansi Digital*. Dalam www.itjen.kemenperin.go.id. (Diakses pada Jum'at, 8 September 2023)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kumalasari, Deti & I B Riharjo. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 5 No. 11.

LAN dan BPKP. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul Sosialisasi AKIP

JAKARTA: LAN RI

Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Mauludi, Ali. 2017. *Analisis Data dengan Statistik*. Jakarta Timur: Alim's Publishing

Nur K, Afista dan Ichwan Marisan. 2022. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). Vol. 6 No. 1 halm. 32-48.

Nurmantari Nining, Jaelan, Abdi. 2016. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Administrasi Publik: Vol. 2 No. 2

PC Doni, Endang Indartuti. 2023. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance*. Vol. 3 No. 01. Manajemen Publik

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 Tentang” Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 Tentang “ Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Pasal 2 Tentang
Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa pasal 74

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006,
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme

Peraturan Menteri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 dan 73 Tahun 2005 dan Peraturan Dalam Negeri
Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Desa

Rahmat Muhammad Rais R, et.al. 2022. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 9 No. 2

Ridha Fajri, et.al. 2021. “Pengaruh Transparansi, Partisipasi
Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Al-Iqtishad Vol. 17
No.2*

Sihotang Rosalia, Sri Yuni, Ferry Christian. 2021. “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Sistem Keuangan Desa, Prinsip-prinsip Good Governance Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa”. *Vol. 1 No. 1*

SPPS Indonesia. *Data Statisti*. Dalam www.spssindonesia.com. (Diakses pada Sabtu, 9 September 2023)

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Skripsi*. Tulungagung :FEBI IAIN

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Vullaela Yuliasuti, et.al. 2022. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa”. *Indonesian Journal of Business and Management*. Vol. 2 No. 3

Widya, Wicaksono Kristian. 2015. *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 19 No. 1